

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintah orde baru. Otonomi daerah di Indonesia telah berjalan lebih dari 20 tahun sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur posisi dan kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada daerah otonom tersebut dikenal dengan istilah desentralisasi. *Fiscal federalism theory* menerangkan bahwa dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, setiap daerah diberikan keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mewujudkan

kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dan juga memiliki tujuan lainnya agar dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengontrol kinerja pemerintah sehingga pemerintah terus memperbaiki kinerjanya (Devi & Tjahjono, 2023).

Menurut Surgawati, (2021) hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut. Artinya, daerah harus mampu menggali, mengelola, dan menggunakan sumber keuangan yang ada di daerahnya untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah sehingga dapat meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan tingkat kemandirian keuangan daerah (Susila et al., 2021). Mencapai kemandirian juga merupakan salah satu barometer dalam mengukur kinerja pemerintah baik secara kuantitatif dalam kinerja keuangan maupun kualitatif dalam kesejahteraan rakyat di daerahnya (Ulfi et al., 2022).

Kemandirian keuangan daerah mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali potensi keuangan yang berasal dari daerah itu sendiri dan terhimpun dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Surgawati, 2021). Peningkatan PAD menjadi salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Semakin tinggi peran PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan

daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah (Sembiring, 2020).

Kemandirian keuangan daerah menjadi faktor kunci tercapainya keberhasilan pembangunan ekonomi daerah serta terwujudnya daerah yang maju dan sejahtera. Namun faktanya, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama dua dasawarsa ini belum berdampak pada perubahan yang fundamental pada tingkat kemandirian daerah. Berdasarkan hasil revidi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas kemandirian keuangan daerah tahun 2020, sebagian besar pemerintah daerah (443 dari 503 pemerintah daerah atau 88,07%) masuk dalam kategori belum mandiri. Hanya terdapat 10 pemerintah daerah atau 2% yang masuk dalam kategori mandiri, dimana 7 dari 10 pemerintah daerah tersebut berada di Pulau Jawa. Pemerintah provinsi memiliki proporsi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) paling baik, disusul pemerintah kota dan terakhir pemerintah kabupaten. Selain itu, daerah bukan penerima dana istimewa atau otonomi khusus memiliki status IKF lebih baik daripada daerah penerima. Terakhir, pemerintah daerah yang dominan pada sektor sekunder memiliki proporsi IKF paling baik disusul dengan sektor tersier kemudian sektor primer (BPK, 2021).

Kemandirian keuangan antardaerah di Indonesia belum merata, sehingga kesenjangan ekonomi di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Kesenjangan sangat terasa terutama jika membandingkan data kemandirian daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Lebarnya jurang kemandirian keuangan sudah mulai terjadi pada tingkat provinsi. IKF tertinggi milik DKI Jakarta terlampaui jauh jika dibandingkan dengan IKF terendah yang dimiliki Provinsi Papua Barat. Kemudian,

jurang kesenjangan kemandirian keuangan semakin melebar ketika diturunkan pada level pemerintah tingkat kabupaten/kota. Adapun gambaran mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi dan terendah tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tertinggi dan Terendah
Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 (Persen)

Tertinggi		Terendah	
Daerah	TKKD	Daerah	TKKD
Kabupaten Badung	85,60	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,31
Kota Surabaya	62,20	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,36
Kota Semarang	59,35	Kabupaten Tambrau	0,38
Kabupaten Gianyar	56,18	Kabupaten Maybrat	0,40
Kota Bekasi	53,66	Kabupaten Mappi	0,42
Rata-rata	63,40	Rata-rata	0,37

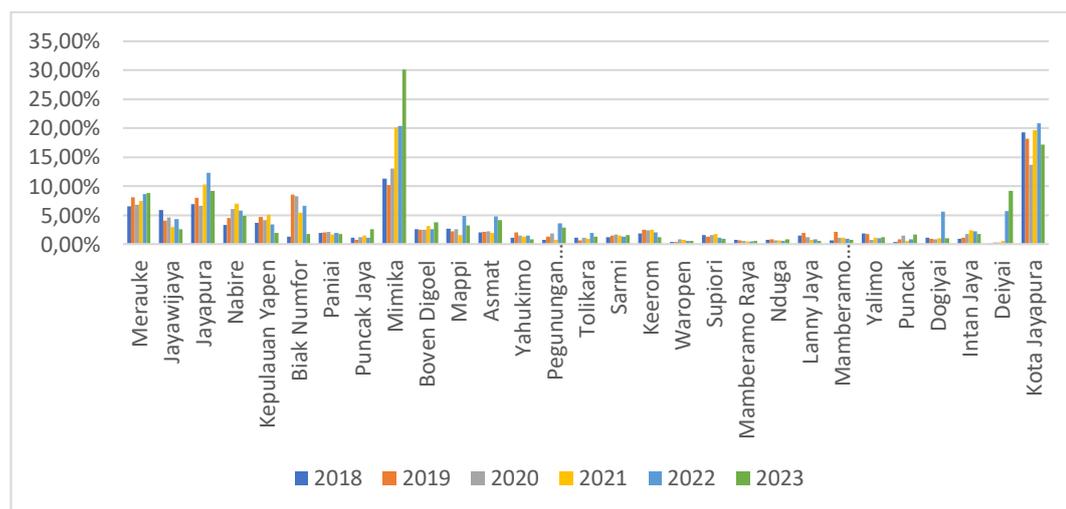
Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Catatan: TKKD = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung, Bali memiliki rasio tertinggi sebesar 85,60%. Artinya, 85,60% belanja pemerintah daerah Kabupaten Badung berasal dari pungutan PAD. Sedangkan, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua memiliki rasio terendah sebesar 0,31%. Artinya, penerimaan pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dari PAD hanya mampu membiayai belanja APBD sebesar 0,31%. Hal ini menandai adanya tantangan nyata dalam desentralisasi fiskal, dimana tidak hanya tingkat kemandirian yang menjadi sorotan, tetapi juga kesenjangan fiskal yang terjadi antar daerah. Secara geografis, lima daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah

tertinggi seluruhnya berada di wilayah Jawa dan Bali. Sementara itu, lima daerah dengan tingkat kemandirian daerah terendah merupakan pemerintah kabupaten yang seluruhnya berada di belahan Papua.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia tentang kemandirian keuangan pemerintah daerah tahun 2019, kemandirian keuangan pemerintah seluruh kabupaten/kota di tanah Papua termasuk dalam kategori belum mandiri. Selain belum mandiri, sebagian besar kabupaten/kota memiliki nilai kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah (BPK, 2020). Kemandirian keuangan daerah tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah (Surgawati, 2021). Adapun gambaran mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar 1. 1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Tahun 2018-2023 (Persen)

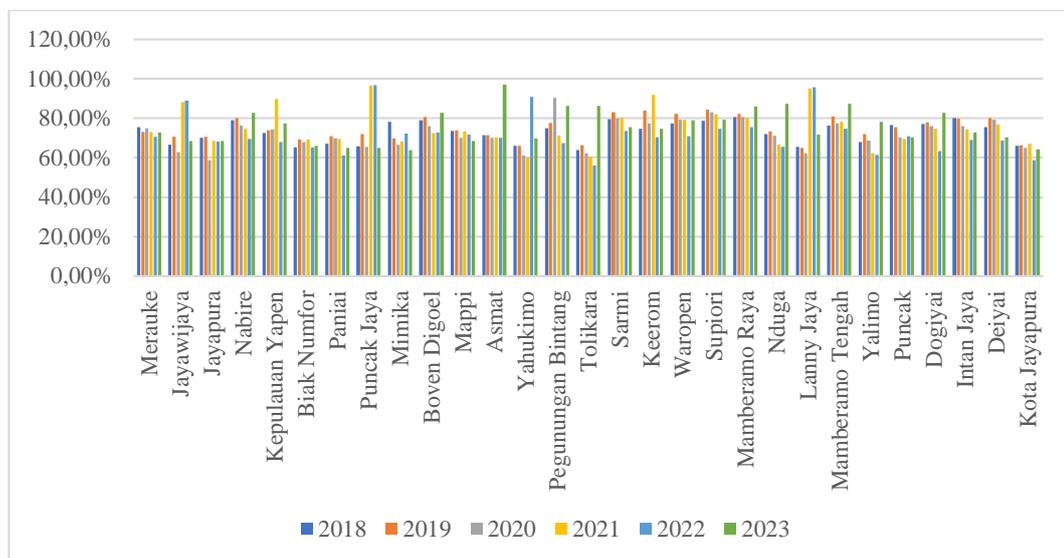
Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua masuk dalam kategori rendah sekali. Daerah dengan tingkat kemandirian di atas 10% selama enam tahun terakhir (2018-2023) adalah Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura. Sementara itu, terdapat 23 kabupaten/kota yang memiliki rasio kemandirian keuangan di bawah 5%. Tingkat kemandirian keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua selama lima tahun terakhir memiliki pola hubungan instruktif (0% -25%). Pola instruktif adalah ketika peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua masih belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya sendiri karena kemampuan keuangan daerahnya masih berada dalam kategori rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di tanah Papua belum mampu mengoptimalkan PAD melalui penerimaan pajak daerah, retribusi, serta penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD).

Weingast (2014) menyatakan bahwa dalam *fiscal federalism theory*, konsep pelaksanaan pemerintah daerah dituntut untuk membiayai sendiri penyediaan barang publik dan pembangunan daerahnya, akan tetapi sumber pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu, muncul adanya transfer dari pemerintah pusat atau lebih dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pemberian dana perimbangan, baik DAU, DAK, maupun DBH pada prinsipnya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pemberian dana perimbangan juga dapat menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat menjadi tinggi, tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD. Situasi ini menyebabkan rendahnya kemandirian dan kemampuan keuangan daerah (Didict et al., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heybert et al. (2022) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya, ketika penerimaan dana perimbangan meningkat maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan meningkat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun.

Tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua terhadap penerimaan dana perimbangan sangat tinggi hal tersebut dapat dilihat dari besaran persentase *intergovergovernmental revenue* pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua masih diatas angka 50% dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan keuangan daerah. *Intergovernmental revenue* diprosikan dengan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan daerah. Tujuan dari perhitungan *intergovergovernmental revenue* adalah untuk mengetahui seberapa besar proporsi dana perimbangan berperan dalam

pendapatan daerah. Adapun gambaran mengenai *intergovernmental revenue* pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar 1. 2
***Intergovernmental Revenue* Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**
Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa peran dana perimbangan terhadap pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2018-2023 bersifat fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan terutama pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 (2021-2022). Pandemi Covid-19 secara nasional membawa dampak yang signifikan kepada ekonomi, kesehatan masyarakat, dan merubah cara hidup masyarakat (Susantono et al., 2020).

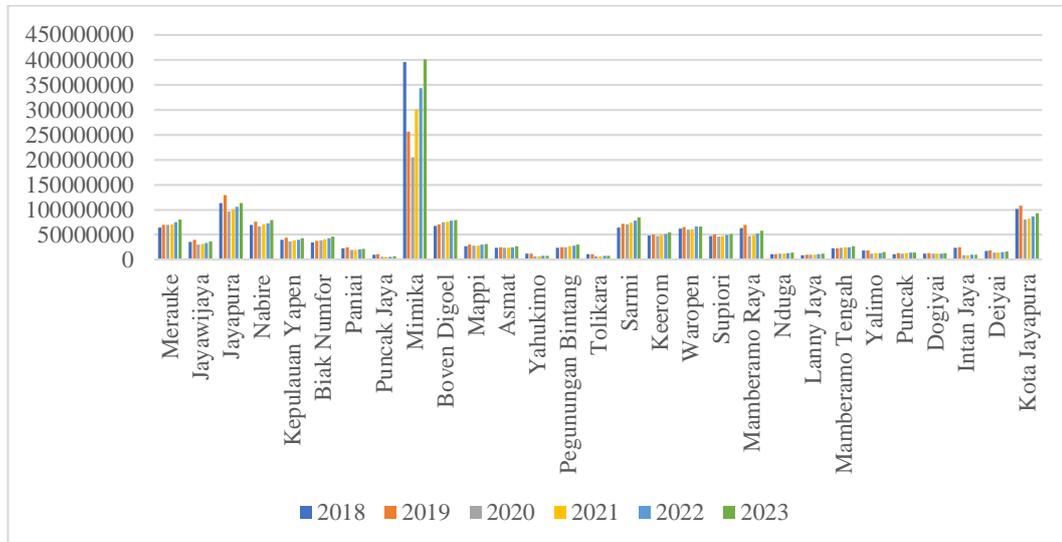
Daerah dengan angka *intergovernmental revenue* tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya dengan rata-rata sebesar 80,89%, diikuti oleh Kabupaten Supiori dengan rata-rata sebesar 80,33%. Sedangkan daerah dengan angka *intergovernmental revenue* terendah adalah Kota Jayapura dengan rata-rata sebesar

64,58%. Besarnya nilai *intergovernmental revenue* tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat tercapai apabila pemerintah daerah bisa meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerahnya melalui PAD. Salah satu komponen dari PAD adalah pajak daerah. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dipengaruhi oleh PDRB per kapita. Todaro (2006: 20) menyatakan bahwa PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pendapatan per kapita riil suatu daerah dan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya (Bembok et al., 2020).

Selama kurun waktu 2018-2023, diketahui bahwa nilai PDRB per kapita setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang berarti daerah ini berhasil dalam pembangunan ekonomi dan semakin mandiri. Hal ini memberikan indikasi yang positif terhadap kemajuan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua. Namun pada tahun 2020, perolehan PDRB per kapita di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi pada tahun 2021-2023 perolehan PDRB per kapita kembali mengalami peningkatan. Adapun gambaran mengenai perolehan PDRB per kapita seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Papua selama kurun waktu 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 1.3.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar 1.3
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Tahun 2018-2023 (Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa daerah dengan perolehan PDRB per kapita tertinggi selama tahun 2018-2023 adalah Kabupaten Mimika dengan rata-rata perolehan sebesar Rp401.128.473, disusul dengan Kabupaten Jayapura dengan rata-rata perolehan sebesar Rp109.998.282. Sedangkan, daerah dengan perolehan PDRB per kapita terendah selama tahun 2018-2023 adalah Kabupaten Puncak Jaya dengan rata-rata perolehan sebesar Rp7.807.074. Pertumbuhan PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Papua yang meningkat dari tahun ke tahun tentunya merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan asli daerahnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua senantiasa berupaya mencari dan mengembangkan potensi daerah guna memenuhi kebutuhan

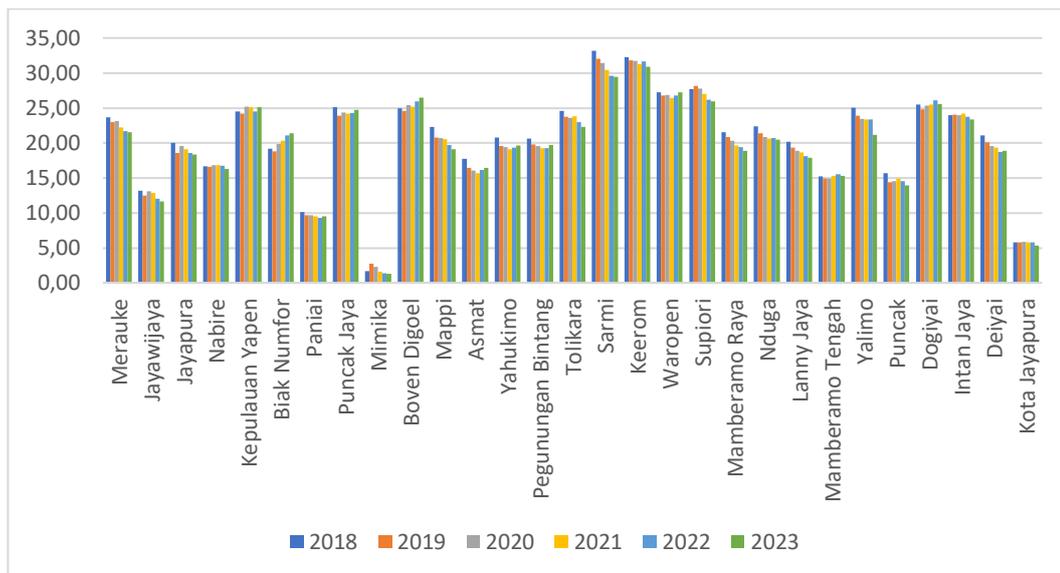
pembiayaan baik rutin maupun pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mengukur kemandirian keuangan daerah yaitu karakteristik daerah (Kusuma, 2017). Karakteristik daerah adalah ciri khas yang menjadi pembeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, dimana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Karakteristik daerah dapat dijelaskan oleh kontribusi dari sektor ekonomi terhadap total PDRB di daerah tersebut. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumberdaya, hal ini mutlak dilakukan dalam era otonomi daerah, dengan mengedepankan kemandirian dan peran aktif pemerintah daerah serta pemberdayaan masyarakat dan swasta (Albetris, 2019).

Salah satu penyumbang tertinggi dalam PDRB kabupaten/kota di Provinsi Papua adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penggerak pembangunan (*engine of growth*) baik dari segi penyedia bahan baku, kesempatan kerja, bahan pangan serta sebagai daya beli bagi produk yang dihasilkan oleh sektor lain. Secara alamiah pembangunan ekonomi harus didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang kuat baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan (Nuryadi, 2021). Johnston dan Mellor (1961) dalam (Bungkuran et al., 2021) menyebutkan bahwa peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi

adalah: (1) sumber utama penyediaan bahan makanan; (2) sumber penghasilan dan pajak; (3) sumber penghasilan devisa yang diperlukan untuk mengimpor modal, bahan baku, dan lain-lain; (4) pasar dalam negeri untuk menampung hasil produksi industri pengolahan dan sektor bahan pertanian lainnya.

Sektor pertanian memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan regional dan nasional. Sektor pertanian bukan saja berperan terhadap ketahanan pangan wilayah nasional, namun juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Papua, dan juga merupakan penyedia lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) Papua melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sukernas) bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dilaporkan menyerap tenaga kerja terbanyak di Bumi Cendrawasih hingga mencapai 69,94%. Laju pertumbuhan sektor pertanian positif tetapi kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan terjadinya proses transformasi struktural perekonomian dan perubahan/pergeseran peranan sektor pertanian di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sedangkan menurut pemikiran teori pembangunan modern, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB akan semakin berkurang dengan semakin majunya perekonomian suatu daerah, penurunan kontribusi tersebut akan terkompensasi oleh peningkatan kontribusi sektor lain (sekunder atau tersier). Adapun gambaran mengenai karakteristik daerah yang diprosikan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB kabupaten/kota di Provinsi Papua selama kurun waktu 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 1.4.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar 1. 4
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi
Papua Tahun 2018-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki kontribusi pertanian tertinggi selama tahun 2018-2023 adalah Kabupaten Keerom dengan rata-rata sebesar 31,60%. Kabupaten Keerom saat ini telah menjadi salah satu lumbung pangan nasional atau *food estate*. Kabupaten Keerom merupakan daerah penghasil sayur-mayur, buah-buahan, dan peternakan yang dipasok ke beberapa wilayah di Papua. Sedangkan, daerah yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2018-2023 adalah Kabupaten Mimika dengan rata-rata sebesar 1,86%. Hal ini dikarenakan sektor basis di Kabupaten Mimika adalah sektor pertambangan dan penggalian. Salah satu perusahaan pertambangan besar yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) berada di Kabupaten Mimika, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika dari sektor pertambangan dan penggalian.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu untuk mengkaji bagaimana upaya pemerintah daerah terutama kaitannya dengan pengaruh *intergovernmental revenue*, PDRB per kapita, dan karakteristik daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian menarik juga untuk melihat bagaimana perkembangan dari masing-masing daerah di Provinsi Papua dengan menggunakan data panel. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang sudah dipaparkan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh *Intergovernmental Revenue*, PDRB Per Kapita, dan Karakteristik Daerah secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Intergovernmental Revenue*, PDRB Per Kapita, dan Karakteristik Daerah secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai identifikasi masalah yang telah disusun oleh peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue*, PDRB Per Kapita, dan Karakteristik Daerah secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2023.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue*, PDRB Per Kapita, dan Karakteristik Daerah secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya pada bidang ekonomi publik untuk membahas *intergovernmental revenue*, PDRB per kapita, karakteristik daerah, dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap kajian yang diteliti baik dari teori maupun praktik terhadap permasalahan yang dibahas sehingga penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai adanya wujud dalam penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk bahan bacaan, bahan masukan dan penelitian lanjutan, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau bahan acuan bagi instansi terkait, sebagai informasi hasil dari kajian ilmiah dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik guna mencapai kemandirian keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2013-2023. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data sebagai bahan penelitian secara sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jurnal ilmiah, serta *website-website* pemerintahan, seperti bpk.go.id, papua.bps.go.id, papua.bpk.go.id, dan lain sebagainya yang didapatkan dari internet.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai bulan Juni 2024, dari mulai pembuatan judul sampai dengan penyelesaian penelitian tersebut. Adapun lebih lengkapnya mengenai waktu penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah:

